

# Laporan



## Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia Tahun 2023

[www.rukki.org](http://www.rukki.org)





**Dipublikasikan:**

1 Agustus 2023

**Penulis:**

Mouhamad Bigwanto

**Ucapan Terima Kasih:**

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mary Assunta, Dr. Widyastuti Soerojo, dan tim SEATCA atas bantuan teknis yang mereka berikan selama proses penulisan laporan ini. Terima kasih kepada Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) yang telah berbagi laporan pemantauan berita terkait isu tembakau di Indonesia secara berkala. Saya juga ingin berterima kasih kepada Farandi A. Ramadhan atas kontribusinya dalam pengelolaan referensi, dan kepada Mohammad Ainul Maruf yang telah membantu dalam proses penerjemahan. Terakhir, saya sangat berterima kasih atas dukungan pendanaan yang diberikan oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Penulisan laporan ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dan masukan berharga dari semua pihak yang telah disebutkan.



## Daftar Isi

Latar Belakang.....	1
Ringkasan Temuan .....	3
1 Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan.....	3
2 Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri .....	3
3 Manfaat bagi Industri .....	4
4 Interaksi yang Tidak Perlu.....	4
5 Transparansi .....	4
6 Konflik Kepentingan .....	4
7 Upaya Pencegahan.....	5
Rekomendasi .....	5
Hasil dan Temuan .....	7
Indikator 1: Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan .....	7
Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri .....	8
Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau .....	10
Indikator 4: Interaksi yang Tidak Perlu .....	11
Indikator 5: Transparansi.....	14
Indikator 6: Konflik Kepentingan.....	14
Indikator 7: Upaya Pencegahan .....	14
Referensi .....	17
Lampiran: Sumber Informasi .....	23

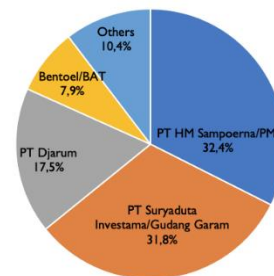


## Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi tembakau tertinggi di dunia. Diperkirakan lebih dari dua pertiga laki-laki dewasa di Indonesia mengonsumsi produk tembakau, menjadikannya salah satu pasar tembakau terbesar di dunia. Permasalahan konsumsi tembakau di Indonesia tidak hanya terkait dengan isu kesehatan masyarakat, melainkan juga adanya campur tangan dari industri tembakau.

Pada tahun 2021, pangsa pasar rokok di Indonesia masih didominasi oleh PT HM Sampoerna atau Philip Morris dengan pangsa pasar 32,4 persen, diikuti oleh Gudang Garam (31,8%), Djarum (17,5%), dan Bentoel atau BAT (7,9%).<sup>i</sup> Dengan demikian, 40,3% pasar rokok di Indonesia dikuasai oleh 2 perusahaan asing besar, yakni Philip Morris dan BAT. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang menarik bagi industri tembakau internasional.

Pangsa Pasar Industri Tembakau (Rokok), Indonesia 2021



*The Tobacco Industry Interference Index (TII Index)* atau Indeks Gangguan Industri Tembakau merupakan alat untuk menilai sejauh mana tingkat campur tangan industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan. *TII Index* memberikan kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai cara di mana industri tembakau bisa mempengaruhi langkah-langkah pengendalian tembakau di tingkat nasional. Indeks ini mencakup tujuh area yang menggambarkan campur tangan industri tembakau. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin besar campur tangan yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan terkait tembakau.

Skor pada *TII Index* tahun 2023 dihitung berdasarkan data yang diambil selama 2 tahun terakhir (April 2021 hingga Maret 2023). Berdasarkan data tersebut, kami menemukan bahwa industri tembakau di Indonesia sangat terlibat dalam pembentukan kebijakan dan mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang adanya interaksi yang tidak perlu di antara pejabat pemerintah tingkat tinggi dengan industri tembakau, dan kurangnya transparansi atas interaksi tersebut.

Industri tembakau juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan citra mereka dan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Selama pandemi COVID-19, industri tembakau berhasil masuk ke sektor kesehatan dengan memberikan bantuan untuk pengobatan COVID-19 kepada pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, terutama bagi Kementerian Kesehatan.

Meskipun saat ini tidak ada pegawai negeri sipil aktif yang bekerja di industri tembakau, masih terdapat kasus di mana mantan pejabat pemerintah memegang posisi yang sangat penting

<sup>i</sup> Global Data. *Cigarettes in Indonesia, 2021*

pada asosiasi yang berhubungan dengan industri tembakau. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada kebijakan dan langkah pencegahan khusus yang dapat diterapkan untuk mengatur interaksi semacam itu.

Melihat berbagai situasi tersebut, skor *TII Index* Indonesia pada tahun 2023 tetap tinggi, mencapai angka 84, yang menunjukkan bahwa campur tangan industri tembakau masih berada pada tingkat yang tinggi. Indonesia telah berada di level ini selama beberapa tahun, dan laporan ini menunjukkan tidak ada kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah tersebut. Laporan *TII Index* ini mengindikasikan bahwa campur tangan industri tembakau menjadi salah satu penghambat upaya pengaturan yang ketat terhadap industri ini. Oleh karena itu, laporan *TII Index* menjadi referensi penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sejauh mana mereka dipengaruhi oleh campur tangan industri tembakau dan untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Laporan ini disusun berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). Terdapat 20 pertanyaan dalam kuesioner ini yang diadopsi dari pedoman Pasal 5.3 Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seluruh informasi yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari informasi publik yang dapat diakses oleh umum. Sistem penilaian digunakan untuk menilai tingkat campur tangan industri tembakau dalam berbagai aspek. Skor dalam penilaian berkisar antara 1 hingga 5, dengan angka 5 menunjukkan tingkat campur tangan yang paling tinggi, sementara angka 1 mengindikasikan campur tangan yang rendah atau tidak ada campur tangan sama sekali. Oleh karena itu, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin baik situasi yang ada dalam negara tersebut dalam hal pengendalian campur tangan industri tembakau.



## Ringkasan Temuan

### I Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 1-4)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan rencana pengembangan peta jalan industri tembakau berdasarkan proposal dari INDEF pada tahun 2019. Beberapa kementerian dan lembaga legislatif di Indonesia mendukung proposal tersebut. Rancangan yang disebut sebagai Peta Jalan Pengelolaan 'Produk Hasil Tembakau' direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan peta jalan tersebut pada awal 2024 atau sebelum diterbitkannya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Di sisi lain, rencana Kementerian Kesehatan untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan mengalami tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam pemerintah sendiri.

Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung pengembangan regulasi khusus untuk produk tembakau baru. Pada Juni 2021, Menteri Investasi mengirim surat kepada PT HM Sampoerna yang mengekspresikan dukungan untuk investasi dalam membangun pabrik Produk Tembakau Padat yang Dipanaskan (PTD) di Indonesia serta mendukung implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk PTD, mendukung produk PTD dijual tanpa peringatan kesehatan bergambar dan dikenakan tarif cukai yang lebih rendah.



Presiden Direktur PT HM Sampoerna, Mindaugas Trumpaitis melakukan 'wefie' dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi beserta sejumlah pejabat pemerintah saat peresmian realisasi investasi pabrik IQOS di Karawang, 30 November 2021.  
Sumber foto: beritajatim.com

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan dianggap normal dan legal. Beberapa kantor bea dan cukai diketahui bekerja sama dengan industri tembakau seperti PT HM Sampoerna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program *Customs Visit Customer (CVC)*.

### 2 Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 5)

Terdapat keterlibatan masif industri tembakau dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan pertembakauan seperti penanganan COVID-19, program vaksinasi, kegiatan pelatihan untuk orang dengan disabilitas, kegiatan lingkungan, dan acara amal lainnya. Keterlibatan industri tembakau dalam kegiatan ini berfungsi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bertujuan untuk meningkatkan citra mereka di mata publik serta memperkuat hubungan mereka dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Industri tembakau juga memberikan bantuan kepada lembaga pemerintah selama pandemi COVID-19. Sumbangan tersebut umumnya berupa peralatan medis, seperti konsentrator oksigen atau alat tes antigen cepat, dan acara penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh pejabat pemerintah atau perwakilannya. Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain KT&G dari Korea, PT Djarum, dan PT HM Sampoerna.



Perwakilan Kementerian Kesehatan menerima bantuan dana penanggulangan COVID-19 dari Korean Tobacco & Ginseng di Jakarta, 15 Oktober 2021.  
Sumber foto: KT&G

### 3 Manfaat bagi Industri

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 6-7)

Industri tembakau menerima berbagai bentuk dukungan dan manfaat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus non-fiskal berupa penundaan pembayaran cukai selama maksimal 90 hari kepada industri tembakau pada tahun 2021 dan 2022, manfaat tersebut disebut sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan industri. Revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tertunda karena tekanan kuat dari industri tembakau terhadap pemerintah. Terdapat perwakilan dari industri tembakau yang diundang untuk memberikan masukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, dan penolakan terhadap kenaikan cukai produk tembakau datang dari berbagai lembaga negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, regulasi yang pro industri tembakau saat ini sedang diinisiasi di tingkat provinsi, dan terjadi penolakan terhadap peraturan daerah yang berencana melarang iklan dan promosi rokok di beberapa kota.

### 4 Interaksi yang Tidak Perlu

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 8-10)

Terdapat beberapa kejadian interaksi yang tidak perlu antara pejabat pemerintah dengan industri tembakau. Sebagai contoh, meskipun Kementerian Kesehatan memiliki Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan menghadiri dan memberikan pidato pada acara yang disponsori oleh industri tembakau. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Program Penilaian Kinerja Industri Hijau (PROPER) kepada PT HM Sampoerna atas upayanya memastikan keberlanjutan lingkungan, yang menciptakan citra positif bagi perusahaan tersebut.



Spanduk bertuliskan Sampoerna dan Kementerian Investasi dipasang di sepanjang jalan untuk mempromosikan program *Online Single Submission* (OSS).

Pemerintah juga menerima, mendukung, dan menjalin kemitraan dengan industri tembakau. Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT HM Sampoerna untuk mempromosikan program *Online Single Submission* (OSS) bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan melakukan *roadshow* ke berbagai kota. Kolaborasi ini didukung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.

### 5 Transparansi

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 11-12)

Pemerintah tidak memiliki mekanisme baku untuk mengungkapkan informasi tentang pertemuan/interaksi dengan industri tembakau ataupun hasilnya kepada publik, meskipun dalam interaksi formal, nama peserta pertemuan biasanya dicatat dalam daftar kehadiran dan notulen rapat. Pemerintah juga tidak mengharuskan industri melaporkan atau mendaftarkan program atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan industri tembakau.

### 6 Konflik Kepentingan

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 13-15)

Dikarenakan adanya peraturan ketat yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar lembaga pemerintah, saat ini tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau.

Namun, pada tahun 2021, setidaknya ada dua mantan pejabat pemerintah dari Kementerian Perindustrian yang menduduki posisi penting di asosiasi industri yang terkait dengan industri tembakau.

## **7 Upaya Pencegahan**

*(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 16-20)*

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan industri tembakau. Pemerintah (melalui Bea Cukai) mewajibkan industri memberikan laporan mengenai volume produksi untuk tujuan perhitungan cukai. Selain itu, pemerintah tidak memiliki program yang konsisten untuk membangun kesadaran publik mengenai pedoman implementasi Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC).

Saat ini, hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki aturan penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau untuk melindungi kebijakan kesehatan masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

## **Rekomendasi**

- Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi campur tangan industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melarang donasi dari industri tembakau, melarang perwakilan industri tembakau untuk menjadi pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, dan membatasi akses industri tembakau kepada para pengambil kebijakan. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang kuat.
- Pemerintah juga perlu menekankan adanya transparansi dalam kegiatan-kegiatan lobi yang dilakukan industri tembakau dan memastikan pengambil kebijakan tidak terlalu terpengaruh oleh kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi kode etik yang mengatur interaksi dengan industri tembakau dan kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka.
- Perlakuan istimewa yang diberikan kepada industri tembakau harus dihitung kembali dengan mempertimbangkan kerugian ekonomi terkait kesehatan masyarakat dan upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul.



	0	1	2	3	4	5
<b>Indikator 1: Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan</b>						
1. Pemerintah <sup>ii</sup> menerima, mendukung, atau memberikan persetujuan terhadap tawaran bantuan oleh industri tembakau, atau berkolaborasi dengan industri tembakau atau entitas/individu yang bekerja untuk kepentingan industri <sup>iii</sup> dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakau <sup>iv</sup> . (Rec 3.4)						5
<p>- Rencana untuk menyusun peta jalan industri tembakau oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan proposal dari INDEF pada tahun 2019<sup>1</sup> dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Peta jalan industri tembakau yang sedang disusun di gadang-gadang sebagai solusi dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Proposal ini didukung oleh beberapa kementerian di Indonesia, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian,<sup>2</sup> serta lembaga legislatif seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<sup>3,4,5</sup> dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>6</sup> Saat ini, rancangan yang disebut sebagai Peta Jalan Pengelolaan ‘Produk Hasil Tembakau’ direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden.<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan peta jalan tersebut pada awal tahun 2024 atau sebelum penyebarluasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.<sup>8,9</sup></p> <p>- Rencana Kementerian Kesehatan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan menghadapi tantangan dari berbagai pihak,<sup>10,11,12</sup> termasuk dari dalam pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,<sup>13,14</sup> Kementerian Pertanian,<sup>15</sup> Kementerian Perindustrian,<sup>16,17</sup> Kementerian Hukum dan HAM,<sup>18,19</sup> anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),<sup>20,21,22,23,24,25</sup> anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),<sup>26</sup> serta Bupati Jombang<sup>27</sup>, Pamekasan, dan Temanggung.<sup>28</sup> Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan memastikan bahwa kepentingan industri tembakau dipertimbangkan dalam proses revisi PP No. 109/2012. Kementerian Hukum dan HAM berharap agar Kementerian Kesehatan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para pelaku industri, dalam merumuskan kebijakan.<sup>29,30</sup></p>						
2. Pemerintah menerima, mendukung, dan memberikan persetujuan terhadap <u>kebijakan atau peraturan yang disusun</u> oleh dan atau berkolaborasi dengan industri tembakau. (Rec 3.4)						5
<p>- Dengan klaim memiliki risiko lebih rendah, industri tembakau mendorong adanya regulasi khusus untuk rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.<sup>31</sup> Pada bulan Juni 2021, Menteri Investasi mengirim surat resmi kepada PT HM Sampoerna, menyatakan bahwa kementerianya mendukung investasi Sampoerna dalam membangun pabrik produk tembakau yang dipanaskan di Indonesia. Terdapat tiga poin lain dalam surat tersebut, di mana Kementerian Investasi akan mendukung implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tembakau yang dipanaskan, mendukung pengecualian dalam implementasi peringatan kesehatan bergambar untuk produk tembakau yang dipanaskan, serta memberlakukan tarif cukai yang lebih rendah. Dukungan</p>						

<sup>ii</sup> Istilah “pemerintah” mengacu pada pejabat publik mana pun, baik yang bertindak dalam lingkup wewenangnya maupun tidak, selama mereka terselubung dalam wewenang tersebut atau bergantung pada pihak lain yang mempunyai wewenang tersebut.

<sup>iii</sup> Istilah “industri tembakau” mencakup pihak-pihak yang mewakili kepentingan mereka atau bekerja untuk memajukan kepentingan mereka, termasuk industri tembakau milik negara.

<sup>iv</sup> Istilah “penawaran bantuan” dapat berupa perancangan undang-undang, masukan teknis, rekomendasi, atau pun studi banding pengawasan.

	0	1	2	3	4	5
terhadap pengembangan regulasi khusus untuk produk tembakau baru tidak hanya berasal dari Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian, tetapi juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian <sup>32,33</sup> dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan mendukung penelitian terkait produk tembakau baru. <sup>34</sup>						
3. Pemerintah mengizinkan/mengundang industri tembakau untuk duduk dalam komite/kelompok penasihat antar lembaga/sector yang menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat. (Rec 4.8)						5
<p>Tidak ada instrumen hukum yang melarang partisipasi industri tembakau dalam pembentukan kebijakan. Pertemuan antara pejabat pemerintah dan industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan dianggap normal. Sebagai contoh, pada tahun 2021, beberapa kantor bea cukai bekerja sama dengan industri, termasuk PT. HM Sampoerna untuk mempromosikan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini dilakukan dalam program yang disebut program CVC (Customs Visit Customer).<sup>35,36</sup></p> <p><b>CATATAN:</b> Indonesia memiliki undang-undang yang memungkinkan keterlibatan individu atau organisasi yang terkait dengan regulasi yang sedang dibahas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 96 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.</li> <li>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Pasal 5(4) UU No. 39/2007 tentang Cukai menetapkan: <p>“Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan ASPIRASI pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.”</p> </li> </ol> <p>Pemerintah akan mengundang dan menerima masukan dari industri tembakau saat <u>forum</u> rapat dengar pendapat atau pembuatan kebijakan.</p>						
4. Pemerintah menominasikan atau mengizinkan perwakilan dari industri tembakau (termasuk industri tembakau milik negara) atau anak perusahaannya dalam delegasi ke Conference of The Parties (COP) atau menerima dukungan dari industri untuk menjadi delegasi (misalnya COP 4 & 5, INB 4 5, WG). <sup>v</sup> (Rec 4.9 & 8.3) <i>Untuk tahun non-COP, samakan skor seperti tahun sebelumnya. Untuk negara non-anggota FCTC, berikan nilai '0'.</i>	0					
Indikator ini tidak berlaku karena Indonesia bukan negara anggota WHO FCTC.						
<b>Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri</b>						
5. A. Lembaga pemerintah atau pejabatnya memberikan persetujuan, mendukung, menjalin kemitraan dengan, atau berpartisipasi dalam kegiatan industri tembakau yang digambarkan sebagai kegiatan “tanggung jawab sosial” (CSR) perusahaan atau program						5

<sup>v</sup> Daftar lampiran sejak tahun 2009 agar responden dapat menghitung frekuensinya, <http://www.who.int/fctc/cop/en/>

	0	1	2	3	4	5
<p>“berkelanjutan”. Sebagai contoh, program-program terkait lingkungan. (Rec 6.2)</p> <p>B. Pemerintah (lembaga dan pejabatnya) menerima sumbangan CSR<sup>vi</sup> (berupa uang atau bentuk lainnya, termasuk sumbangan CSR) dari industri tembakau atau mereka yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 6.4)</p> <p><i>CATATAN: Kegiatan penegakan hukum tidak termasuk karena hal tersebut dibahas dalam pertanyaan lain</i></p>						
<p>5.A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengapresiasi dukungan dari PT Sukun dan PT Djarum dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus untuk mengurangi jumlah kasus COVID-19. Apresiasi ini disampaikan oleh Menteri saat memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video dengan pejabat pemerintah daerah.<sup>37</sup></li> <li>2. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) bersama dengan Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO) melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk 400 pekerja di industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Acara ini diresmikan oleh Direktur Fasilitas Teknis dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan.<sup>38</sup></li> <li>3. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang bekerja sama dengan PT Trubus Alami (perusahaan tembakau lokal) mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kondisi kerja layak bagi penyandang disabilitas.<sup>39</sup></li> <li>4. PT Nojorono Tobacco International bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kudus di Jawa Tengah melaksanakan vaksinasi untuk karyawan perusahaan dan warga desa di sekitar pabrik. Nojorono menyediakan fasilitas vaksinasi dan melibatkan ribuan pekerjanya untuk mendapatkan vaksin.<sup>40</sup></li> <li>5. Perusahaan rokok Sukun mengadakan acara Safari Ramadan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Ketua Dewan MUI Kabupaten Blora. Seratus anak yatim dari berbagai daerah diundang sebagai penerima donasi.<sup>41</sup></li> <li>6. PT Nojorono Tobacco International mengadakan kegiatan penanaman benih Tabebuya di Bendungan Logung, Kudus, Jawa Tengah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan penanaman benih tersebut dihadiri oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus.<sup>42</sup></li> </ol> <p>5.B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KT&amp;G, perusahaan produk tembakau asal Korea Selatan berpartisipasi dalam acara serah terima sumbangan peralatan medis di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021. Dalam acara tersebut, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan mengungkapkan rasa terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan lain yang turut berpartisipasi juga memberikan pidato mereka dan menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Kesehatan.<sup>43,44</sup></li> <li>2. Djarum Foundation mendonasikan 1.000 unit alat konsentrator oksigen melalui Kementerian Perindustrian untuk beberapa rumah sakit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Donasi ini secara simbolis diserahkan oleh Wakil Direktur Program Pelayanan Sosial Djarum Foundation kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro di Kementerian Perindustrian di Semarang dan dihadiri oleh Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.<sup>45</sup></li> </ol>						

<sup>vi</sup> Kontribusi untuk bidang politik, keuangan sosial, pendidikan, komunitas, keahlian teknis atau pelatihan untuk melawan penyelundupan atau bentuk kontribusi lainnya.

	0	1	2	3	4	5
3. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima 3.000 kit tes antigen cepat dari PT HM Sampoerna. Sponsorship ini secara simbolis diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan di halaman kantor Dinas Pendidikan. <sup>46</sup>						
<b>Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau</b>						
6. Pemerintah mengakomodasi permintaan dari industri tembakau untuk waktu pelaksanaan yang lebih lama atau penundaan pelaksanaan peraturan terkait pengendalian tembakau (tenggat waktu penerapan aturan peringatan kesehatan bergambar umumnya diberikan selama 180 hari, dan penerapan kenaikan cukai dapat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan). (Rec 7.1)						5
<p>A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan stimulus non-fiskal berupa penundaan pembayaran cukai selama maksimum 90 hari kepada industri tembakau pada tahun 2021 dan 2022.<sup>47,48</sup> Ini merupakan tindakan responsif dari pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau terkait permohonan pemberian relaksasi pembayaran cukai.<sup>49,50</sup> Keputusan ini didukung oleh Bupati Jombang dan dianggap dapat menjaga keberlanjutan industri tembakau yang termasuk dalam industri padat karya.<sup>51</sup> Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah juga memberikan relaksasi serupa.</li> <li>2. Revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau untuk Kesehatan, yang diinisiasi sejak tahun 2018, belum selesai hingga saat ini. Lamanya proses penyelesaian revisi peraturan ini disebabkan oleh tekanan kuat dari industri terhadap pemerintah.<sup>52,53</sup></li> <li>3. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang 22 perwakilan dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing kota/kabupaten. Dalam surat undangan disebutkan bahwa peraturan KTR di 22 kota/kabupaten tersebut terindikasi tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri mengundang perwakilan dari Sampoerna sebagai salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut.</li> <li>4. Penolakan terhadap kenaikan cukai cukup intens pada tahun 2021 dan 2022. Penolakan ini berasal dari berbagai perwakilan lembaga negara seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,<sup>54,55</sup> Kementerian Perindustrian,<sup>56,57</sup> Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),<sup>58</sup> anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),<sup>59,60,61</sup> anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),<sup>62</sup> anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur,<sup>63</sup> dan Bupati Temanggung.<sup>64</sup> Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, anggota DPR meminta kenaikan cukai rokok maksimum sebesar 7% (rata-rata) dan untuk cukai rokok SKT kenaikan maksimum 2%.<sup>65,66</sup> Penolakan terhadap kenaikan cukai dari anggota DPR juga ditujukan untuk produk rokok elektronik.<sup>67</sup></li> </ol> <p>B. Tingkat provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengembangkan rancangan peraturan daerah tentang pertembakauan untuk mendukung industri tembakau di provinsi tersebut.<sup>68,69</sup> Sementara itu, di kota lain seperti Padang, anggota komisi Badan Anggaran dan Keuangan (Banggar) DPRD Kota Padang menolak implementasi larangan iklan dan promosi rokok dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) karena iklan rokok dianggap dapat menambah pendapatan daerah.<sup>70</sup> Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang akan melarang iklan rokok juga terjadi di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.<sup>71,72,73</sup></li> </ol>						
7. Pemerintah memberikan hak istimewa, insentif, pembebasan pajak/cukai, atau manfaat khusus kepada industri tembakau. (Rec 7.3)						5



A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian)

1. Setelah berhasil meluncurkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tembakau yang dipanaskan (PTD),<sup>74,75</sup> Kementerian Perindustrian memberikan dukungan penuh dan bantuan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menerbitkan regulasi SNI untuk rokok elektronik.<sup>76,77</sup>
2. Kementerian Keuangan memutuskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membeli mesin produksi rokok baru yang akan ditempatkan di Kawasan Industri Hasil Tembakau Kecil (KIHT).<sup>78</sup> DBHCHT juga digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelatihan pembuatan cerutu<sup>79</sup> dan oleh Kabupaten Sinjai untuk membangun rumah produksi tembakau terpadu.
3. Kementerian Pertanian mengusulkan asuransi untuk petani tembakau, dengan pendanaan diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).<sup>80</sup>
4. Kementerian Luar Negeri berencana untuk membantu memfasilitasi kerja sama antara industri cerutu di Jember dengan Kuba.<sup>81</sup> Menurut Direktur Amerika II, Kementerian Luar Negeri, "Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi berbagai persiapan dan pelaksanaan kerja sama tersebut," dan kerja sama ini juga akan diperluas ke negara-negara lain.
5. Sistem tarif cukai berjenjang (*tiers*) memberikan manfaat bagi industri rokok, di mana pada tahun 2022, PT. HM Sampoerna mampu menjual rokok merek Marlboro dengan harga yang sangat rendah karena rokok tersebut dikategorikan sebagai Rokok Kelembak Menyan (KLM). Menyadari celah ini, pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Keuangan dan menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk rokok KLM dengan kapasitas produksi lebih dari 4 juta batang per bulan menjadi KLM Grup I atau dikenai cukai sebesar Rp 440 per batang. Sementara itu, rokok KLM yang diproduksi oleh pabrik dengan kapasitas produksi kurang dari 4 juta batang per bulan diklasifikasikan sebagai KLM Grup II (tarif sebesar Rp 25 per batang). Namun, potensi kerugian cukai telah terjadi. Kebijakan baru dari Kementerian Keuangan tidak mengatur kewenangan untuk mengumpulkan selisih cukai dari rokok KLM yang telah diproduksi sebelumnya oleh perusahaan rokok besar.<sup>82,83</sup>

B. Tingkat provinsi

1. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan tahun 2022-2024. Salah satu target yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah peningkatan produksi tembakau di Jawa Timur serta perlindungan bagi petani tembakau, buruh tembakau, dan pekerja pabrik rokok melalui pemberian bantuan langsung tunai, jaminan perlindungan produk tembakau, subsidi harga tembakau, bantuan modal usaha, penyediaan bibit/benih/pupuk dan/atau fasilitas produksi dan infrastruktur.<sup>84,85</sup>
2. Gubernur Jawa Tengah mendorong pemerintah pusat untuk mendirikan Pusat Tembakau dan mengundang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun Pusat Riset Tembakau.<sup>86,87</sup>
3. Bupati Jepara memberikan jaminan kemudahan kepada pengusaha rokok ilegal di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah untuk mendapatkan izin.<sup>88</sup>

**Indikator 4: Interaksi yang Tidak Perlu**

8. Para pejabat tingkat tinggi pemerintah (seperti Presiden/Perdana Menteri atau Menteri <sup>vii</sup> ) bertemu/membangun hubungan dengan industri tembakau, seperti menghadiri acara sosial dan acara lain yang disponsori atau diadakan oleh industri tembakau atau pihak yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 2.1)						5
---	--	--	--	--	--	---

<sup>vii</sup> Termasuk anggota keluarga dekat para pejabat tinggi.

	0	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada bulan September 2022, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi pembicara pada acara Indonesia Millennial &amp; Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Media. Meskipun acara tersebut disponsori oleh salah satu program yang terafiliasi dengan industri rokok (SUPERLIVE) dan terdapat promosi produk Djarum Super, Menteri Kesehatan tetap menghadiri dan memberikan pidato dalam acara tersebut.<sup>89</sup></li> <li>- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan pidato secara daring pada peresmian Pabrik IQOS pada tanggal 12 Januari 2023 di Karawang, Jawa Barat. Upacara peresmian tersebut disaksikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Industri. Kepala BRIN dalam sambutannya menyatakan apresiasinya kepada Sampoerna atas investasi dan inovasi yang dilakukan di Indonesia.<sup>90,91</sup> Selain dari Pemerintah Pusat, apresiasi atas pembangunan Pabrik IQOS juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendirian Pabrik IQOS dianggap telah memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai investasi di Provinsi Jawa Barat.<sup>92</sup></li> <li>- Menteri Perdagangan mengunjungi gudang produksi rokok PT Sukun Warton Indonesia di Kudus dan berjanji untuk membantu produsen rokok tersebut dalam mengeksport produknya.<sup>93</sup></li> <li>- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penguatan merek dan ekspansi pasar untuk cerutu khas Gayo selama kunjungannya ke Lokakarya Cerutu Gunung Gayo di Takengon, Aceh Tengah.<sup>94</sup></li> <li>- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan fasilitas produksi rokok elektronik milik perusahaan Tiongkok, PT Smoore Technology Indonesia di Malang.<sup>95</sup></li> <li>- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengapresiasi upaya dari perusahaan rokok Sukun dalam penanganan pencegahan COVID-19 di perusahaannya.<sup>96</sup></li> <li>- PT. HM Sampoerna menerima penghargaan Program Penilaian Kinerja Industri Hijau (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2021. Sampoerna dianggap berhasil dalam menjalankan program keberlanjutan lingkungan di lokasi produksinya.<sup>97</sup></li> </ul>						
<p>9. Pemerintah menerima atau ditawarkan bantuan dari industri tembakau dalam hal penegakan hukum, seperti melakukan razia terhadap penyelundupan produk tembakau, bantuan penerapan kawasan tanpa rokok, atau larangan penjualan kepada anak di bawah umur (termasuk kontribusi finansial untuk kegiatan-kegiatan tersebut). (Rec 4.3)</p>						5
<p>Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung program yang dilakukan oleh industri rokok dalam mencegah perokok di bawah umur.<sup>98,99,100</sup></p>						
<p>10. Pemerintah menerima, mendukung, menyetujui, atau melakukan kemitraan atau perjanjian tidak mengikat dengan industri tembakau atau entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 3.1) <i>CATATAN: Bagian ini tidak termasuk kegiatan CSR, kegiatan penegakan hukum, atau pengembangan kebijakan pengendalian tembakau karena bagian tersebut sudah dibahas dalam pertanyaan sebelumnya.</i></p>						5
<p>A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian)</p> <p>I. Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT HM Sampoerna untuk memastikan kesuksesan program <i>Online Single Submission (OSS)</i> bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Mereka melakukan <i>roadshow</i> ke beberapa kota untuk mempromosikan program tersebut. Kolaborasi ini juga didukung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.<sup>101,102</sup></p>						

2. Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada kegiatan Paviliun Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) 2023 yang diadakan di Hotel Morosani Schweizerhof di Swiss. Sebagai bagian dari partisipasi Indonesia dalam WEF 2023, BKPM juga menyelenggarakan *Indonesia Night* dan mengundang Djarum Foundation untuk berpartisipasi dan menampilkan berbagai seniman dari Indonesia.<sup>103</sup>
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian mendukung dan mengapresiasi program kemitraan petani tembakau yang dilakukan oleh PT. HM Sampoerna.<sup>104,105</sup>

#### B. Tingkat provinsi

1. Wakil Gubernur Bali menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap pengembangan pabrik PT Mitra Prodin di Jembrana. PT Mitra Prodin merupakan produsen kertas rokok dari Bali.<sup>106</sup>
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mendorong Pemerintah Kabupaten Kudus untuk berkolaborasi dengan perusahaan rokok dalam membangun infrastruktur.<sup>107</sup> Selain itu, Bupati Kudus juga mendorong generasi muda untuk belajar tentang inovasi rokok kretek dan meminta guru sejarah untuk menyertakan kunjungan ke museum kretek dalam kurikulum sekolah.<sup>108</sup> Instruksi dari Bupati untuk mempromosikan kretek diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus dengan menyelenggarakan Expo "Kretek Pulang ke Rumah" di museum kretek bekerja sama dengan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kudus dan Republik Tjangklong Akar Rumput (RTAR), organisasi masyarakat pecinta tembakau tradisional.<sup>109</sup>
3. Wakil Bupati Temanggung menghadiri dan mengapresiasi workshop yang diselenggarakan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung. Ia berharap agar APTI Temanggung dengan manajemen baru dapat menjadi jembatan bagi petani tembakau agar lebih sejahtera.<sup>110</sup> Selain itu, Bupati Temanggung juga bertemu dengan manajemen Gudang Garam di Kediri untuk membahas kerjasama agar tembakau dari petani di Temanggung dapat dibeli dengan harga tinggi.<sup>111</sup>
4. Musyawarah Daerah III DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang, serta perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Timur.<sup>112</sup>
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Festival Kopi dan Tembakau yang berlangsung di Alun-Alun Kota Situbondo. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan produk kopi dan tembakau Situbondo baik secara nasional maupun internasional.<sup>113</sup>
6. Pemerintah Kota Bontang berencana merevisi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang saat ini melarang iklan rokok. Upaya untuk mencabut larangan iklan rokok mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok yang percaya bahwa aturan larangan iklan rokok telah menghambat kreativitas generasi muda di Bontang.<sup>114,115</sup>
7. Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan pertemuan koordinasi dengan pengusaha, perwakilan perusahaan rokok, petani tembakau, dan akademisi menjelang musim tanam 2021. Bupati Jember berharap bahwa keberhasilan yang sebelumnya dicapai oleh Kabupaten Jember dalam pengembangan industri tembakau dapat kembali diraih.<sup>116</sup> Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendukung permintaan petani tembakau untuk menolak perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.<sup>117</sup>
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai berpartisipasi dalam Pameran Tembakau Sulawesi Selatan di kota Makassar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta Tembakau Sulawesi Selatan.<sup>118</sup>

	0	1	2	3	4	5
<b>Indikator 5: Transparansi</b>						
11. Pemerintah tidak secara terbuka mengungkapkan pertemuan/interaksi dengan industri tembakau dalam kasus-kasus di mana interaksi tersebut sangat diperlukan untuk regulasi. (Rec 2.2)						5
Tidak ada mekanisme standar bagi pemerintah untuk secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai pertemuan/interaksi dengan industri tembakau atau hasil dari interaksi tersebut.						
12. Pemerintah mewajibkan adanya aturan untuk pengungkapan atau pendaftaran entitas industri tembakau, organisasi yang terafiliasi, dan individu yang bertindak atas nama mereka, termasuk pelobi. (Rec 5.3)						5
Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus yang mengharuskan industri tembakau untuk melaporkan atau mendaftarkan anggota atau lembaga yang terafiliasi dengan industri tembakau.  Dalam interaksi formal, nama-nama peserta dalam setiap pertemuan dicatat dalam daftar hadir dan notulen pertemuan. Daftar hadir dan notulen tersebut tidak tersedia untuk umum.						
<b>Indikator 6: Konflik Kepentingan</b>						
13. Pemerintah tidak melarang sumbangan dari industri tembakau atau entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau kepada partai politik, kandidat, atau kampanye politik, atau mengharuskan pengungkapan penuh mengenai sumbangan tersebut. (Rec 4.11)						5
Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye partai politik wajib mengundurkan diri; namun, tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan dari berbagai sumber termasuk industri tembakau untuk kampanye politik.						
14. Pejabat pemerintah yang telah pensiun menjadi bagian dari industri tembakau (mantan Perdana Menteri, Menteri, Jaksa Agung). (Rec 4.4)					4	
Terdapat dua kejadian pada tahun 2021: - Benny Wahyudi, Mantan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai Ketua Gaprindo (Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia). <sup>119</sup> - Willem Petrus Riwu, Mantan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia). <sup>120</sup>						
15. <u>Pejabat pemerintah</u> aktif dan kerabatnya memegang posisi dalam bisnis tembakau termasuk posisi konsultan. (Rec 4.5, 4.8, 4.10)	0					
Tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau, termasuk posisi konsultan. Terdapat regulasi ketat yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar pemerintahan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan.						
<b>Indikator 7: Upaya Pencegahan</b>						
16. Pemerintah telah menetapkan prosedur untuk mengungkapkan catatan/rekaman interaksi (seperti agenda, peserta, notulen, dan hasil) dengan industri tembakau dan perwakilannya. (Rec 5.1)						5
Tidak ada kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan industri tembakau. Biasanya, rapat formal dicatat dalam bentuk notulen rapat; tidak ada perbedaan antara industri tembakau dan industri lainnya, industri tembakau dianggap sebagai industri normal dan diperlakukan sama dengan industri normal lainnya.						

	0	1	2	3	4	5
<p>17. Pemerintah telah merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kode etik untuk pejabat publik yang mengatur standar yang harus dipatuhi dalam berhubungan dengan industri tembakau. (Rec 4.2);  <i>I jika ada kode etik untuk seluruh Lembaga pemerintah; 2 jika ada, namun hanya sebagian (hanya ada di Kementerian Kesehatan)</i></p>			2			
<p>Pemerintah Indonesia memiliki kode etik umum untuk semua pejabat publik dalam berinteraksi dengan pihak di luar pemerintahan, tetapi tidak secara khusus ditujukan untuk industri tembakau. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37/2012 tentang "Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan" adalah kode etik yang berlaku secara umum bagi pejabat dan aparatur negara dalam berinteraksi dengan semua lembaga atau perusahaan di luar sektor pemerintahan. Regulasi ini menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang secara khusus menjadi kode etik untuk menghindari benturan kepentingan dengan industri tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang "Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan" diperluas untuk mencakup ketentuan-ketentuan yang berlaku secara eksklusif bagi industri tembakau yang berbahaya.</p>						
<p>18. Pemerintah mewajibkan industri tembakau untuk secara berkala mengirimkan informasi tentang produksi tembakau, manufaktur, pangsa pasar, pengeluaran pemasaran, pendapatan, dan aktivitas lainnya, termasuk lobi, filantropi, kontribusi politik, dan semua aktivitas lainnya. (5.2)</p>			2			
<p>Hanya beberapa lembaga pemerintah atau kementerian yang meminta industri tembakau untuk menyampaikan laporan, misalnya laporan terkait volume produksi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk perhitungan cukai tahunan.</p> <p>Informasi lain seperti jumlah karyawan, luas lahan, produksi daun tembakau, impor, ekspor, pangsa pasar, dan lain-lain dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan lain seperti pengeluaran iklan, promosi, dan sponsor.</p>						
<p>19. Pemerintah memiliki program/sistem/rencana untuk secara konsisten<sup>viii</sup> meningkatkan kesadaran di dalam lembaga pemerintah atau kementerian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Pedoman Pasal 5.3 FCTC. (Rec 1.1, 1.2)</p>						5
<p>Meskipun akses WHO FCTC merupakan topik advokasi yang sering dirujuk, namun belum ada program di pemerintah yang secara konsisten membangun kesadaran tentang pasal-pasal WHO FCTC atau pedoman implementasinya.</p>						
<p>20. Pemerintah telah mempunyai kebijakan yang melarang penerimaan segala bentuk sumbangan/hadiah dari industri tembakau (uang atau lainnya) termasuk tawaran bantuan, rancangan kebijakan, atau undangan kunjungan studi yang diberikan atau ditawarkan kepada pemerintah, lembaga pemerintah, pejabat dan kerabatnya. (3.4)</p>			2			
<p>Hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki kebijakan untuk mencegah pejabat dan aparatur sipil negara di wilayah administrasi Kementerian Kesehatan dari campur tangan industri tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1599) berlaku khusus untuk industri tembakau yang mempunyai karakteristik khusus dan merugikan kesehatan. Peraturan yang diundangkan pada</p>						

<sup>viii</sup> Dalam konteks pertanyaan ini, "secara konsisten" berarti: a. Setiap kali FCTC dibahas, dijelaskan tentang 5.3. DAN b. Setiap kali kesempatan muncul, seperti ketika campur tangan industri tembakau ditemukan atau dilaporkan.

	0	1	2	3	4	5
tanggal 26 Oktober 2016 tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB No. 37/2012.						
<b>SKOR TOTAL</b>						<b>80</b>

Sebagai negara non-anggota WHO FCTC, pertanyaan 4 tidak berlaku untuk Indonesia. Sehingga jumlah skor 80 setelah disesuaikan dan dihitung kembali ( $80 \div 95 \times 100$ ) skor akhirnya menjadi **84**.

# Referensi

- <sup>1</sup> Haryadi, M. Dorong roadmap industri hasil tembakau untuk amankan investasi. *Tribunnews*, 10 Dec 2019. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/12/10/dorong-roadmap-industri-hasil-tembakau-untuk-amankan-investasi?page=3>
- <sup>2</sup> Iswanto, D. Roadmap industri hasil tembakau harus perhatikan keseimbangan. *Akurat.co*, 13 April 2021. <https://akurat.co/roadmap-industri-hasil-tembakau-harus-perhatikan-keseimbangan?page=2>
- <sup>3</sup> Putra, IR. Anggota DPR Sebut Industri Tembakau Butuh Kepastian Usaha di Tengah Penurunan Ekonomi. *Merdeka*, 21 Jul 2021. <https://www.merdeka.com/uang/anggota-dpr-sebut-industri-tembakau-butuh-kepastian-usaha-di-tengah-penurunan-ekonomi.html>
- <sup>4</sup> Syafriadi, A. Baleg DPR Minta Pemerintah Buat UU IHT Harus Berlandaskan Keadilan. *Akurat.co*, 27 May 2021. <https://akurat.co/baleg-dpr-minta-pemerintah-buat-uu-iht-harus-berlandaskan-keadilan>
- <sup>5</sup> Soebagyo, F. Urgensi Regulasi Pertembakauan yang Berkeadilan. *Akurat.co*, 11 Juni 2021, <https://akurat.co/urgensi-regulasi-pertembakauan-yang-berkeadilan?page=1>
- <sup>6</sup> Barus, H. Pimpinan MPR RI Dukung Pemerintah Bentuk Road Map IHT yang berkeadilan. *Industry.co*, 04 May 2021. <https://www.industry.co.id/read/85248/pimpinan-mpr-ri-dukung-pemerintah-bentuk-road-map-iht-yang-berkeadilan>
- <sup>7</sup> *Merdeka.com*. Pemerintah Tengah Susun Roadmap Nasional, Ini bocoran isinya. 13 Jul 2022. <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tengah-susun-roadmap-iht-nasional-ini-bocoran-isinya.html>
- <sup>8</sup> Kurniati, D. Kemenkeu Beberkan Tantangan Menyusun Roadmap Industri Hasil Tembakau, DDTc, 13 Dec 2022. <http://news.ddtc.co.id/kemenkeu-beberkan-tantangan-menyusun-roadmap-industri-hasil-tembakau-44181>
- <sup>9</sup> Intan, G. DPR Desak Pemerintah Buat Peta Jalan Industri Hasil Tembakau. *VOA*, 14 Dec 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-desak-pemerintah-buat-peta-jalan-industri-hasil-tembakau/6876136.html>
- <sup>10</sup> Panca, HE. Kadin Jatim: Revisi PP 109/2012 Tekan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau. 31 Mar 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/31/kadin-jatim-revisi-pp-1092012-tekan-keberlangsungan-industri-hasil-tembakau>
- <sup>11</sup> Mahadi, T. Asosiasi Pengusaha Rokok Dukung Pemerintah tak merevisi PP 109/2012. *Industry*, 29 Jun 2021. <https://industri.kontan.co.id/news/asosiasi-pengusaha-rokok-dukung-pemerintah-tak-merevisi-pp-1092012?page=all>
- <sup>12</sup> Supriyatna, I. PDIP: Revisi PP 109 memperparah Angka Pengangguran. *Suara.com*, 21 Jun 2021. <https://www.suara.com/bisnis/2021/06/21/105408/pdip-revisi-pp-109-memperparah-angka-pengangguran>
- <sup>13</sup> Supriyatna, I. Pemerintah Fokus pada Penanganan COVID-19, PP 109 bukan prioritas. *Suara.com*, 19 Jul 2022. <https://www.suara.com/bisnis/2021/07/29/102026/pemerintah-fokus-pada-penanganan-covid-19-revisi-pp-109-bukan-prioritas>
- <sup>14</sup> Evandio, A. Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 ganggu iklim Usaha Tembakau. *Bisnis.com*, 14 Sep 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220914/12/1577325/kemenko-perekonomian-revisi-pp-1092012-ganggu-iklim-usaha-tembakau>
- <sup>15</sup> *Media Perkebunan*. Revisi PP 109/2012 beratkan petani. 16 Jul 2022, <https://mediaperkebunan.id/revisi-pp-1092012-beratkan-petani/>
- <sup>16</sup> Gareta, SP. kementerian Revisi PP Soal Tembakau tak Tepat dilakukan saat pandemi. *Antara*, 10 Jun 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2203770/kemenperin-revisi-pp-soal-tembakau-tak-tepat-dilakukan-saat-pandemi>
- <sup>17</sup> Intan, N. Kemenperin: PP No 109/2012 masih Relevan dengan IHT. *Republika*, 31 Jul 2022. <http://www.republika.co.id/berita/rfw6ej349/kemenperin-pp-no-1092012-masih-relevan-dengan-iht>
- <sup>18</sup> Putra, DA. Kemenkumham: Penyusunan Regulasi Harus Bebas dari Intervensi. *Tirto*, 24 Oct 2022. <https://tirto.id/kemenkumham-penyusunan-regulasi-harus-bebas-dari-intervensi-gxDs>
- <sup>19</sup> Nordiansyah, E. Pemerintah Jamin Kebijakan Sektor Strategis Penopang Ekonomi Bebas Intervensi. *Medcom*, 26 Oct 2022. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rkje9agb-pemerintah-jamin-kebijakan-sektor-strategis-penopang-ekonomi-bebas-intervensi>
- <sup>20</sup> Supriyatna, I. Revisi PP 109 Hanya Memperburuk Kondisi Petani Tembakau di Tengah Pandemi. *Suara.com*, 14 Jul 2022. <https://www.suara.com/bisnis/2021/07/14/094053/revisi-pp-109-hanya-memperburuk-kondisi-petani-tembakau-di-tengah-pandemi?page=all>
- <sup>21</sup> Satryo, A. Memicu Peredaran Rokok Ilegal, Pimpinan Komisi XI Keberatan PP 109/2012 Direvisi. *Rmol.id*, 15 Jul 2021. <https://politik.rmolid.com/read/2021/07/15/496562/memicu-peredaran-rokok-ilegal-pimpinan-komisi-xi-dpr-keberatan-pp-109-2012-direvisi>
- <sup>22</sup> Amjad, M. Jaga Kas Negara dan Perekonomian Warga di Tengah Pandemi. *JPNN*, 28 Jul 2021. <https://www.jpnn.com/news/jaga-kas-negara-dan-perekonomian-warga-di-tengah-pandemi?page=2>
- <sup>23</sup> Putra, A. Revisi Aturan Pengendalian Rokok Ancam Ciptakan PHK Massal. *Merdeka.com*, 03 Jun 2021 <https://www.merdeka.com/uang/revisi-aturan-pengendalian-rokok-ancam-ciptakan-phk-massal.html?page=all>
- <sup>24</sup> Khoirunnisa, J. Kabar Revisi PP 109/2012 Mencuat, Komisi IV minta pemerintah Hati-hati. *Detik.com*, 29 May 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5586457/kabar-revisi-pp-1092012-mencuat-komisi-iv-minta-pemerintah-hati-hati?single=1>
- <sup>25</sup> *Merdeka.com*. Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Petani Tembakau. 31 Mar 2021. <https://www.merdeka.com/uang/anggota-dpr-ingatkan-pemerintah-lindungi-petani-tembakau.html>
- <sup>26</sup> Kliwatoro, D. ketua DPD RI minta pemerintah perhatikan nasib petani tembakau. *Antara news*, 30 Apr 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2130358/ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perhatikan-nasib-petani-tembakau>
- <sup>27</sup> Yessy. Jika Revisi PP 109 Dijalankan, Mohon Maaf, Petani Jombang Tidak Siap. *JPNN*, 19 Jul 2021. <https://www.jpnn.com/news/jika-revisi-pp-109-dijalankan-mohon-maaf-petani-jombang-tidak-siap>

- 
- <sup>28</sup> Supriyatna, I. Kepala Daerah Kompak Tolak Revisi PP 109 Tentang Produk Tembakau. Suara.com, 23 Jul 2022 <https://www.suara.com/bisnis/2021/07/23/092316/kepala-daerah-kompak-tolak-revisi-pp-109-tentang-produk-tembakau?page=all>
- <sup>29</sup> Sulaiman, F. Biar Nggak jadi Polemik, Kemenkumham Minta K/L Libatkan Publik Saat Membuat Aturan. Warta Ekonomi, 01 Oct 2021. <https://wartaekonomi.co.id/read364637/biar-nggak-jadi-polemik-kemenkumham-minta-kl-libatkan-publik-saat-membuat-aturan>
- <sup>30</sup> Wijayanto, N. Soal Kenaikan Cukai, Aspirasi Buruh Rokok Perlu Didengarkan. Sindo News, 05 Oct 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/560206/34/soal-kenaikan-cukai-aspirasi-buruh-rokok-perlu-didengarkan-1633439420>
- <sup>31</sup> Gunawan, I. Supaya Rokok Elektrik Bisa Efektif Kurangi Kebiasaan Merokok, Regulasi Khusus Diperlukan. Bumncinc, 02 Apr 2021. <https://bumncinc.com/supaya-rokok-elektrik-bisa-efektif-kurangi-kebiasaan-merokok-regulasi-khusus-diperlukan/>
- <sup>32</sup> Noor, F. Pemerintah Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Tembakau. Republika, 12 Jun 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita//rodq79490/pemerintah-dorong-pengembangan-industri-pengolahan-tembakau>
- <sup>33</sup> Riswan, K. Airlangga Lepas Ekspor Produk Tembakau Inovatif Bebas Asap ke Malaysia. Antara, 13 Jan 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3347607/airlangga-lepas-ekspor-produk-tembakau-inovatif-bebas-asap-ke-malaysia>
- <sup>34</sup> Pratama, Rl. BRIN Nilai Riset Tembakau Untuk Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik. Tribun news, 08 Nov 2022. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/11/08/brin-nilai-riset-tembakau-penting-untuk-pertumbuhan-industri-rokok-elektrik>
- <sup>35</sup> Ditjen Bea Cukai. Customs Visit Customer: Bea Cukai Kunjungi Pabrik Rokok dan UKM. 28 Apr 2021. <https://www.beacukai.go.id/berita/customs-visit-customer-bea-cukai-kunjungi-pabrik-rokok-dan-ukm.html>
- <sup>36</sup> Alamsyah, El. Lewat CVC, Bea Cukai Pantau Kinerja Pengguna Jasa. Republika, 13 Jul 2021. <https://republika.co.id/berita/qw6oar349/lewat-cvc-bea-cukai-pantau-kinerja-pengguna-jasa>
- <sup>37</sup> Nazarduddin, A. Keterlibatan perusahaan di Kudus tangani COVID-19 diapresiasi pusat. Antara, 27 Jul 2021. <https://jateng.antaraneews.com/berita/394266/keterlibatan-perusahaan-di-kudus-tangani-covid-19-diapresiasi-pusat>
- <sup>38</sup> Yessy. Wujudkan Industri HPTL Tangguh, Asosiasi Gelar Program Vaksinasi COVID-19. JPNN.com, 18 Aug 2021. <https://www.jpnn.com/news/wujudkan-industri-hptl-tangguh-asosiasi-gelar-program-vaksinasi-covid-19>
- <sup>39</sup> Fajarwati, F. Gandeng Perusahaan Lokal, Disnaker Fasilitas Penyandang Disabilitas. Jawa Pos, 12 Apr 2021. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-roya/kabupaten-malang/12/04/2021/gandeng-perusahaan-lokal-disnaker-fasilitas-penyandang-disabilitas/>
- <sup>40</sup> Wibisono, R. Nojorono Kudus Vaksinasi Karyawan dan Warga Sekitar Pabrik. Solo Pos, 03 Jul 2021. [https://www.solopos.com/nojorono-kudus-vaksinasi-karyawan-warga-sekitar-pabrik-1136619?utm\\_source=terkini\\_desktop](https://www.solopos.com/nojorono-kudus-vaksinasi-karyawan-warga-sekitar-pabrik-1136619?utm_source=terkini_desktop)
- <sup>41</sup> Halo Semarang. Perusahaan Rokok Asal Kudus Santuni 1.000 Anak Yatim Piatu di Blora. 13 Apr 2022. <https://halosemarang.id/perusahaan-rokok-asal-kudus-santuni-1-000-anak-yatim-piatu-di-blora>
- <sup>42</sup> Nojorono Media Publikasi. Nojorono Kudus Rayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Tanam Bibit Tabebuya Di Bendungan Logung. 09 Jun 2022. <https://www.nojorono.com/lastest-publication-det/NOJORONO-KUDUS-RAYAKAN-HARI-LINGKUNGAN-HIDUP-SEDUNIA-TANAM-BIBIT-TABEBUYA-DI-BENDUNGAN-LOGUNG25/id>
- <sup>43</sup> Harry. KT&G Salurkan Bantuan Alat-alat Medis Untuk Penanganan Covid-19 Kepada Pemerintah Indonesia. Jakarta Kita, 01 Nov 2021. <https://jakartakita.com/2021/11/01/ktg-salurkan-bantuan-alat-alat-medis-untuk-penanganan-covid-19-kepada-pemerintah-indonesia/>
- <sup>44</sup> Media Indonesia, Dukung Atasi COVID- 19 Perusahaan Global Beri Bantuan Kepada Kemenkes RI. 01 Nov 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/443796/dukung-atasi-covid-19-perusahaan-global-korsel-beri-bantuan-kepada-kemenkes-ri>
- <sup>45</sup> Antoni, A. Djarum Foundation Donasikan 1.000 Unit Konsentrator Oksigen ke Rumah Sakit Jateng-DIY. Sindo, 10 Sept 2021. <https://photo.sindonews.com/view/18660/djarum-foundation-donasikan-1-000-unit-konsentrator-oksigen-ke-rumah-sakit-jateng-diy>
- <sup>46</sup> Pemerintah Kabupaten Pasuruan. PT HM Sampoerna Beri Bantuan 3000 Rapid Antigen Untuk Kembali Santri di Kabupaten Pasuruan. 21 May 2021. <https://pasuruankab.go.id/isiberita/pt-hm-sampoerna-beri-bantuan-3000-rapid-antigen-untuk-kembali-santri-di-kabupaten-pasuruan->
- <sup>47</sup> Santoso, IY. GGRM, HMSP hingga Djarum dapat insentif cukai hingga belasan triliun. Kontan, 31 Aug 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/ggrm-hmsp-hingga-djarum-dapat-insentif-cukai-hingga-belasan-triliun?page=all>
- <sup>48</sup> Kurniati, D. Catat Fasilitas Penundaan Pelunasan Cukai 90 Hari Resmi Berlaku. DDTC, 26 Apr 2022. <https://news.ddtc.co.id/catat-fasilitas-penundaan-pelunasan-cukai-90-hari-resmi-berlaku-38747>
- <sup>49</sup> Torus. Penundaan Pembayaran Cukai Rp 71 Triliun oleh Kemenkeu. Borneo 24, 24 Jul 2021. <https://borneo24.com/nasional/penundaan-pembayaran-cukai-rp-71-triliun-oleh-kemenkeu/>
- <sup>50</sup> Liputan 6. Pemerintah Beri Relaksasi Pembayaran Pita Cukai, Pengusaha Semringah. 09 Aug 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4627912/pemerintah-beri-relaksasi-pembayaran-pita-cukai-pengusaha-semringah>
- <sup>51</sup> Nordiansyah, E. Pemerintah Diminta Melindungi Industri Hasil Tembakau yang Tertekan Pandemi. Medcom, 22 Jul 2022. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/RkjWBG9K-pemerintah-diminta-melindungi-industri-hasil-tembakau-yang-tertekan-pandemi?p=all>
- <sup>52</sup> Hayati, I. Pemerintah Setengah Hati Melindungi Anak-anak dari Iklan Rokok. Tempo.co, 14 Oct 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1645140/pemerintah-setengah-hati-melindungi-anak-anak-dari-iklan-rokok>
- <sup>53</sup> Manan, N. “Medan Laga” Pembatasan Rokok di Indonesia. Project Multatuli, 30 May 2022 <https://projectmultatuli.org/medan-laga-pembatasan-rokok-di-indonesia/>
- <sup>54</sup> Bineskasri, R. Pemerintah Diminta Ringankan Beban Industri Hasil Pengolahan Tembakau. Andalan News, 25 Aug 2021. <https://andalannews.com/pemerintah-diminta-ringankan-beban-industri-hasil-pengolahan-tembakau/>
-



- 55 Ridwan. Mohon Maaf Bu Sri Mulyani! Kemenperin: Kami Kurang Sepakat jika Cukai Rokok Naik Terlalu Tinggi. Industry.id, 05 Nov 2021. <https://www.industry.co.id/read/96765/mohon-maaf-bu-sri-mulyani-kemenperin-kami-kurang-sepakat-jika-cukai-rokok-naik-terlalu-tinggi>
- 56 Purwanton, I. Ekonomi Masih Berat, Kemenperin Minta Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2023 Dikaji Lagi. Inilah.com, 18 Aug 2022. <https://www.inilah.com/ekonomi-berat-kemenperin-minta-kenaikan-cukai-rokok-dikaji-lagi>
- 57 Susanti, DS. Kemenperin 4 Ribu Tenaga Kerja Terdampak Kenaikan Tarif CHT di 2020. Antara, 21 Oct 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2472625/kemenperin-4-ribu-tenaga-kerja-terdampak-kenaikan-tarif-cht-di-2020>
- 58 Asatu News. Tarif Cukai Naik, Perhatikan Petani Tembakau dan Produksi Rokok Dalam Negeri. 10 Nov 2022. <https://asatunews.co.id/index.php/indeks-ekonomi/9854-tarif-cukai-naik-perhatikan-petani-tembakau-dan-produksi-rokok-dalam-negeri>
- 59 Supriyanto. Kemenkeu dan Komisi XI Perlu Segera Lakukan Pembahasan Mengenai Kenaikan Tarif Cukai Rokok. Nusantarav.com, 09 Nov 2022. <https://dpr.nusantarav.com/senayan/kemenkeu-dan-komisi-xi-perlu-segera-lakukan-pembahasan-mengenai-kenaikan-tarif-cukai-rokok>
- 60 Nugroho, Y. Khawatir Terdampak Inflasi, DPR Minta Tenaga Kerja Dilindungi dari Kenaikan Cukai. Warta Ekonomi, 19 Sept 2022. <https://wartaekonomi.co.id/read445113/khawatir-terdampak-inflasi-dpr-minta-tenaga-kerja-dilindungi-dari-kenaikan-cukai>
- 61 Detik.com. Begini Jadinya Nasib Buruh Kalau Cukai Rokok Naik 2022. 02 Nov 2021. <https://finance.detik.com/industri/d-5793928/bu-sri-mulyani-begini-jadinya-nasib-buruh-kalau-cukai-rokok-naik-2022?single=1>
- 62 Subarkah, M. Senator DPD: Kenaikkan Cukai Rokok Sulitkan Petani Tembakau. Republika, 05 Dec 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rm8n8w385/senator-dpd-kenaikkan-cukai-rokok-sulitkan-petani-tembakau?>
- 63 Kanalsatu. CHT Akan Dinaikkan, Perlu Kekuatan Kolektif Konsumen untuk Lindungi Ekosistem Pertembakauan. 23 Aug 2022. <http://kanalsatu.com/id/post/58597/cht-akan-dinaikkan--perlu-kekuatan-kolektif-konsumen-untuk-lindungi-ekosistem-pertembakauan>
- 64 Suyitno, H. Pemkab Temanggung DBHCHT Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Antara, 10 Oct 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3168697/pemkab-temanggung-dbhcht-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>
- 65 Zulfikar, M. Komisi XI dukung kenaikan cukai rokok maksimal tujuh persen. Antara, 11 Oct 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3171205/komisi-xi-dukung-kenaikan-cukai-rokok-maksimal-tujuh-persen>
- 66 Fadil, V. DPR Minta Menkeu Kaji Ulang Kenaikan Cukai SKT Menjadi 2%. Warta Ekonomi, 14 Dec 2022. <https://wartaekonomi.co.id/read466293/dpr-minta-menkeu-kaji-ulang-kenaikan-cukai-skt-menjadi-2>
- 67 DPR Nusantara TV. Memberatkan Pengusaha, Gus Muhaimin: Cukai Vape Jangan Terlalu Tinggi. 09 Dec 2022. <https://dpr.nusantarav.com/senayan/memberatkan-pengusaha-gus-muhaimin-cukai-vape-jangan-terlalu-tinggi>
- 68 Putra, NY. Penguatan Potensi Tembakau di Jawa Timur, DPRD Bersama Pemprov Godok Raperda Pertembakauan. Tribun News, 31 Jan 2023. <https://jatim.tribunnews.com/2023/01/31/penguatan-potensi-tembakau-di-jawa-timur-dprd-bersama-pemprov-godok-raperda-pertembakauan>
- 69 Jurnal 3. Masukan DPRD Jatim Soal Raperda Pengembangan dan Perlindungan Tembakau. 17 Jan 2023. <http://jurnal3.net/2023/01/17/masukan-dprd-jatim-soal-raperda-pengembangan-dan-perlindungan-tembakau/>
- 70 Expos Sumbang. Iklan Rokok Menurut Mastilizal Aye: Salah Satu Penyumbang PAD. 09 Dec 2022. <http://www.expossumbar.com/2022/12/iklan-rokok-menurut-mastilizal-aye.html>
- 71 Rahadi, F. Keterlibatan Konsumen dalam Penentuan Kebijakan Pertembakauan Masih. Rejogja, 11 Aug 2022. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rgfk7m291/keterlibatan-konsumen-dalam-penentuan-kebijakan-pertembakauan-masih-minim>
- 72 Permana, C. Penetapan KTR Jangan Jadi Bumerang dengan Tidak Ada Tempat Khusus Perokok, Minat Turis Bisa Turun. Tribunnews, 17 Nov 2021. <https://jabar.tribunnews.com/2021/11/17/penetapan-ktr-jangan-jadi-boomerang-dengan-tidak-ada-tempat-khusus-perokok-minat-turis-bisa-turun>
- 73 Herdian, L. DKI bakal Sanksi Toko Pajang Iklan Rokok, DPR: Langgar HAM!. Pontas.id, 27 Sept 2021. <https://pontas.id/2021/09/27/dki-bakal-sanksi-toko-pajang-iklan-rokok-dpr-langgar-ham/>
- 74 Atmoko, C. BSN Rumuskan Standar produk HPTL Untuk Lindungi Konsumen. Antara, 04 Sept 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2371198/bsn-rumuskan-standar-produk-hptl-untuk-lindungi-konsumen>
- 75 Yessy. Label SNI Berdampak pada Meningkatnya Kualitas Produk Tembakau. JPNN, 07 Sept 2021. <https://www.jpnn.com/news/label-sni-berdampak-pada-meningkatnya-kualitas-produk-tembakau>
- 76 Gareta, PS. Kemenperin Siapkan Standardisasi Produk Rokok Elektrik. Antara, 04 Nov 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3223081/kemenperin-siapkan-standardisasi-produk-rokok-elektrik>
- 77 Fauzan, R. Mantap SNI Rokok Elektrik Keluar Tahun Ini. Bisnis.com, 18 Jul 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220718/257/1556357/mantap-sni-rokok-elektrik-vape-keluar-tahun-ini>
- 78 Nazarudin, A. DBHCHT bisa digunakan untuk membeli mesin pembuat rokok. Antara, 23 Apr 2021. <https://jateng.antaraneews.com/berita/377926/dbhcht-bisa-digunakan-untuk-membeli-mesin-pembuat-rokok>
- 79 Suyitno, H. DBHCHT untuk pelatihan membuat cerutu di Temanggung. Antara, 24 Aug 2022. <https://jateng.antaraneews.com/berita/461085/dbhcht-untuk-pelatihan-membuat-cerutu-di-temanggung>
- 80 Sanusi. Tembakau Tanaman Rentan Risiko Pemerintah Siapkan Asuransi Bagi Petani. Tribunnews, 7 Jul 2021. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/07/tembakau-tanaman-rentan-risiko-pemerintah-siapkan-asuransi-bagi-petani>
- 81 Solichah, Z. Kemenlu fasilitasi kerja sama Jember dengan Kuba soal cerutu. Antara, 23 Jul 2021. <https://jatim.antaraneews.com/berita/621745/kemenlu-fasilitasi-kerja-sama-jember-dengan-kuba-soal-cerutu>
- 82 Muslimawati, N. Pemerintah Diminta Kejar Selisih Cukai dari Perusahaan Rokok Besar Pembuat KLM. Kumparan, 7 Jul 2022. <http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-diminta-kejar-selisih-cukai-dari-perusahaan-rokok-besar-pembuat-klm-lyQ0toKGF2w>

- 83 Fadilah, I. Sampoerna Buka Suara Soal Tarif Baru Kelembak Kemenyan. Detik.com, 08 Jul 2022. <https://finance.detik.com/industri/d-6168700/sampoerna-buka-suara-soal-tarif-baru-rokok-kelembak-kemenyan>
- 84 Ilham, M. Khofifah Terbitkan Pergub Pengembangan Tembakau, Target 2 Ton Per Hektar. Surabayaapagi.com, 05 Jun 2022. <https://www.surabayapagi.com/read/khofifah-terbitkan-pergub-pengembangan-tembakau-target-2-ton-per-hektar>
- 85 Yanti. Kadin Jatim dukung Pemerintah fasilitasi sertifikasi mutu produk tembakau. Mercuryfm.id, 17 Jun 2022. <http://mercuryfm.id/1734935/>
- 86 Sanita, T. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Ajak BRIN Bangun Pusat Riset Tembakau. Liputan 6, 03 Oct 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4674486/gubernur-jateng-ganjar-pranowo-ajak-brin-bangun-pusat-riset-tembakau>
- 87 Suara Merdeka. Ganjar Dorong Pembentukan Tobacco Center. 11 Aug 2022. [https://ima.ebdesk.com/upload\\_scan\\_scaled/2022-08-11/SUARA\\_MERDEKA1/Ganjar%20Dorong%20Pembentukan%20Tobacco%20Center=1=2=1.jpg](https://ima.ebdesk.com/upload_scan_scaled/2022-08-11/SUARA_MERDEKA1/Ganjar%20Dorong%20Pembentukan%20Tobacco%20Center=1=2=1.jpg)
- 88 Ahmad. Bupati Jepara Beri Kemudahan Izin Pengusaha Rokok Ilegal. Gatra, 04 Aug 2021. <https://www.gatra.com/news-518788-hukum-bupati-jepara-beri-kemudahan-izin-pengusaha-rokok-ilegal.html>
- 89 Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022. <https://www.imgs.idntimes.com/>
- 90 Jakarta Post. Minister Airlangga Inaugurates Sampoerna's Smoke Free Tobacco Product Factory and Export. 18 Jan 2023. <https://www.thejakartapost.com/adv/2023/01/18/minister-airlangga-inaugurates-sampoernas-smoke-free-tobacco-product-factory-and-export.html>
- 91 Imanulhaq, A. Menko Airlangga Resmikan Realisasi Investasi Produk Inovatif Berorientasi Ekspor PT HM Sampoerna. Tribunnews, 01 Dec 2021. <https://jateng.tribunnews.com/2021/12/01/menko-airlangga-resmikan-realisasi-investasi-produk-inovatif-berorientasi-ekspor-pt-hm-sampoerna>
- 92 Bisnis.com. Pabrik Tembakau Bebas Asap HMSP Berkontribusi pada Investasi di Jabar. 20 Jan 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230120/9/1620186/pabrik-tembakau-bebas-asap-hmsp-berkontribusi-pada-investasi-di-jabar>
- 93 Fajar. MA. Mendag Zulhas Akan Bantu Produsen Rokok Lakukan Ekspor. Inilah.com, 28 Sep 2022. <http://www.inilah.com/mendag-zulhas-akan-bantu-produsen-rokok-lakukan-ekspor>
- 94 Ita. MenKopUKM Teten Dukung Perkuatan Brand & Perluasan Pasar Cerutu Khas Gayo. Beritadaerah.co.id, 1 Mar 2022. <https://www.beritadaerah.co.id/2022/03/01/menkopukm-teten-dukung-perkuatan-brand-perluasan-pasar-cerutu-khas-gayo/>
- 95 Junida, IA. Bahlil Resmikan Pabrik Rokok Elektrik Rp12 Triliun Di Malang. Antara, 30 Jun 2022. <http://www.antaranews.com/berita/2970209/bahlil-resmikan-pabrik-rokok-elektrik-rp12-triliun-di-malang>
- 96 Jiwandhana, A. Strategi Sukun Putus Klaster COVID-19 di Pabrik Dipaparkan ke Menko Luhut. Muria News, 26 Jul 2021. <https://www.murianews.com/2021/07/26/230285/strategi-sukun-putus-klaster-covid-19-di-pabrik-dipaparkan-ke-menko-luhut>
- 97 Hariyanto. Upaya Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi Antarkan Sampoerna Raih PROPER Hijau 2020–2021. Industry, 08 Feb 2022. <https://www.industry.co.id/read/101992/upaya-efisiensi-energi-dan-pengurangan-emisi-antarkan-sampoerna-raih-proper-hijau-2020-2021>
- 98 Liputan 6. DPR Dukung Industri Cegah Konsumsi Rokok di Kalangan Anak. 22 Apr 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539490/dpr-dukung-industri-cegah-konsumsi-rokok-di-kalangan-anak>
- 99 Liputan 6. Kemenperin Gaungkan Pencegahan Perokok Anak dan Peredaran Rokok Ilegal. 01 May 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4953236/kemenperin-gaungkan-pencegahan-perokok-anak-dan-peredaran-rokok-ilegal>
- 100 Media Indonesia. Relx Intenational Luncurkan Program Inisiatif Perlindungan Anak dan Konsumen. 22 Jun 2021. <https://mediaindonesia.com/internasional/413684/relx-international-luncurkan-program-inisiatif-perlindungan-anak-dan-konsumen>
- 101 Media Indonesia. Sampoerna Fasilitasi 300 UMKM Dapatkan NIB. 24 Dec 2021. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/sampoerna-fasilitasi-300-umkm-dapatkan-nib>
- 102 Putranto, DE. Dukung UMK Perseorangan, Pemerintah Berikan NIB. Republika, 09 Jul 2022. <https://visual.republika.co.id/berita/repwlq375/dukung-umk-perseorangan-pemerintah-berikan-nib>
- 103 Hiria. Indonesia Night 2023 Hadirkan Ragam Budaya, Hiburan, dan Kuliner Indonesia di Forum Ekonomi Dunia. Intipseleb, 23 Jan 2023. <http://www.intipseleb.com/lokal/57510-indonesia-night-2023-hadirkan-ragam-budaya-hiburan-dan-kuliner-indonesia-di-forum-ekonomi-dunia>
- 104 Erik, S. Pemerintah Dukung program Kemitraan Petani Tembakau Dengan Swasta. Tribun, 08 Jul 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/pemerintah-dukung-program-kemitraan-petani-tembakau-dengan-swasta>
- 105 Karunia, MA. Program Kemitraan Mampu Angkat Derajat Petani Temanggung. Kompas.com, 19 Jul 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/170000026/program-kemitraan-mampu-angkat-derajat-petani-tembakau>
- 106 Redaksi 9. Masuknya Investor ke Jembrana, Wagub Cok Ace Berharap Warga Ikut Ambil Peluang. Redaksi9.com, 23 Mar 2022. <http://redaksi9.com/read/6416/Masuknya-Investor-ke-Jembrana--Wagub-Cok-Ace-Berharap-Warga-Ikut-Ambil-Peluang.html>
- 107 Sipan, R. DPRD Dorong Pemkab Kudus Gandeng Perusahaan Rokok untuk Bangun Infrastruktur. Betanews, 15 Jul 2022. <https://betanews.id/2022/07/dprd-dorong-pemkab-kudus-gandeng-perusahaan-rokok-untuk-bangun-infrastruktur.html>
- 108 Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kudus. Bupati Kudus Dorong Anak Muda Pelajari Inovasi Rokok Kretek. 10 Nov 2021. <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/bupati-kudus-dorong-anak-muda-pelajari-inovasi-rokok-kretek>

- 
- <sup>109</sup> Rosyidi, A. Catat Tanggalnya, Ekraf dan Disbudpar Kudus Akan Gelar Expo Bertajuk 'Kretek Pulang ke Rumah'. Betanews, 07 Feb 2023. <https://betanews.id/2023/02/catat-tanggalnya-ekraf-dan-disbudpar-kudus-akan-gelar-expo-bertajuk-kretek-pulang-ke-rumah.html>
- <sup>110</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dorong Petani Tembakau Manfaatkan Teknologi. Jatengprov.go.id, 31 Mar 2022. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dorong-petani-tembakau-manfaatkan-teknologi/>
- <sup>111</sup> Magelang Ekspres. Bupati Temui Direksi Gudang Garam di Kediri. 30 Aug 2022. [https://ima.ebdesk.com/upload\\_scan\\_scaled/2022-08-30/MAGELANG\\_EKSPRESI/Bupati%20Temui%20Direksi%20Gudang%20Garam%20di%20Kediri=1=4=1.jpg](https://ima.ebdesk.com/upload_scan_scaled/2022-08-30/MAGELANG_EKSPRESI/Bupati%20Temui%20Direksi%20Gudang%20Garam%20di%20Kediri=1=4=1.jpg)
- <sup>112</sup> Wibisono, Y. APTI: Kalau Petani Tembakau Jatim Mogok, Industri Rokok Tutup. Beritajatim, 10 Apr 2021. <https://beritajatim.com/ekbis/apti-kalau-petani-tembakau-jatim-mogok-industri-rokok-tutup/>
- <sup>113</sup> Hartanto, H. Bupati Berharap Festival Kopi dan Tembakau Situbondo Bisa Merebut Pasar Nasional dan Internasional. Beritanasional.id, 26 Aug 2022. <https://beritanasional.id/bupati-berharap-festival-kopi-dan-tembakau-situbondo-bisa-merebut-pasar-nasional-dan-internasional/>
- <sup>114</sup> Usmi, I. Komunitas Musik dan Seni di Bontang Dukung Rencana Walikota Basri Rase Merevisi Aturan Iklan Rokok. Tribunnews, 23 May 2021. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/05/23/komunitas-musik-dan-seni-di-bontang-dukung-rencana-walikota-basri-rase-merevisi-aturan-iklan-rokok>
- <sup>115</sup> Annas. Bapenda Bontang Dukung Rencana Revisi Perda Larangan Iklan Rokok. News bontang, 27 May 2021. <https://newsbontang.com/bapenda-bontang-dukung-rencana-revisi-perda-larangan-iklan-rokok>
- <sup>116</sup> Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Hendy Optimis Kembali Kejayaan Tembakau Jember. Jember.go.id, 09 May 2021. <https://www.jemberkab.go.id/bupati-hendy-optimis-kembali-kejayaan-tembakau-jember/>
- <sup>117</sup> Wirawan, AO. DPRD Jember Tandatangani Dukungan untuk Petani Tembakau. Berita Jatim, 31 May 2022. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dprd-jember-tandatangani-dukungan-untuk-petani-tembakau/>
- <sup>118</sup> Khair, F. Tembakau Soppeng Berumur Puluhan Tahun Dipamerkan di Makassar. Rakyatku.com, 04 Apr 2021. <https://rakyatku.com/read/198318/tembakau-soppeng-berumur-puluhan-tahun-dipamerkan-di-makassar>
- <sup>119</sup> MNC Trijaya. Tarif Cukai Rokok Naik 12%, Pengusaha: Besarannya tak Wajar. 14 Dec 2021. <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/48511/tarif-cukai-rokok-naik-12-pengusaha-besarannya-tak-wajar>
- <sup>120</sup> Susanto, YV. Gapri tolak rencana revisi aturan pengamanan zat adiktif produk tembakau. Kontan, 16 Jun 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/gapri-tolak-rencana-revisi-aturan-pengamanan-zat-adiktif-produk-tembakau>



## Lampiran: Sumber Informasi

### Sumber Data

Pemantauan harian media (cetak dan daring) dari eBdesk antara tanggal 1 April 2021 hingga 31 Maret 2023. Sumber informasi tambahan digunakan untuk klarifikasi ketika dibutuhkan:

	INDUSTRI TEBAKAU	PANGSA PASAR	MEREK	SUMBER/URL
1	PT HM Sampoerna/PMI	32.4%	A Mild, Marlboro etc.	<a href="http://www.sampoerna.com/id_id/pages/homepage.aspx">http://www.sampoerna.com/id_id/pages/homepage.aspx</a>
2	Gudang Garam	31.8%	GG Filter, GG Surya etc.	<a href="http://www.gudanggaramtbk.com/">http://www.gudanggaramtbk.com/</a>
3	Djarum	17.5%	Djarum Super, LA etc.	<a href="https://www.djarum.com/">https://www.djarum.com/</a>
4	Bentoel Group/BAT	7.9%	Dunhill, Lucky Strike etc.	<a href="http://www.bentoelgroup.com/">http://www.bentoelgroup.com/</a>

	MEDIA/SURAT KABAR UTAMA	URL
1	detik.com	<a href="https://www.detik.com/">https://www.detik.com/</a>
2	Kompas	<a href="https://www.kompas.com/">https://www.kompas.com/</a>
3	tribunnews.com	<a href="https://www.tribunnews.com/">https://www.tribunnews.com/</a>
4	suara.com	<a href="https://www.suara.com/">https://www.suara.com/</a>
5	Tempo	<a href="https://www.tempo.co/">https://www.tempo.co/</a>
6	Kontan	<a href="https://www.kontan.co.id/">https://www.kontan.co.id/</a>
7	Antara	<a href="https://www.antaraneews.com/">https://www.antaraneews.com/</a>
8	Media Indonesia	<a href="https://mediaindonesia.com/">https://mediaindonesia.com/</a>
9	Republika	<a href="https://www.republika.co.id/">https://www.republika.co.id/</a>
10	akurat.co	<a href="https://akurat.co/">https://akurat.co/</a>
11	merdeka.com	<a href="https://www.merdeka.com/">https://www.merdeka.com/</a>
12	industry.co.id	<a href="https://www.industry.co.id/">https://www.industry.co.id/</a>
13	ddtc.co.id	<a href="https://ddtc.co.id/">https://ddtc.co.id/</a>
14	bisnis.com	<a href="https://bisnis.com/">https://bisnis.com/</a>
15	wartaekonomi.co.id	<a href="https://wartaekonomi.co.id/">https://wartaekonomi.co.id/</a>

	FRONT GROUPS INDUSTRI TEMBAKAU	JENIS (FRONT GROUP, KELOMPOK LOBI, INDIVIDU)	SUMBER/URL
1	Sampoerna Foundation	Afiliasi Industri	<a href="http://www.sampoernafoundation.org/">http://www.sampoernafoundation.org/</a>
2	Djarum Foundation	Afiliasi Industri	<a href="http://www.djarumfoundation.org/">http://www.djarumfoundation.org/</a>
3	AMTI	Front Group	<a href="http://amti.id/">http://amti.id/</a>
4	APTI	Front Group	<a href="http://petanitembakau.blogspot.co.id/">http://petanitembakau.blogspot.co.id/</a>
5	GAPPRI	Afiliasi/Asosiasi Industri	
6	APVI	Afiliasi/Asosiasi Industri	<a href="https://apvi.id/">https://apvi.id/</a>
7	Komunitas Kretek	Front Group	<a href="http://komunitaskretek.or.id/">http://komunitaskretek.or.id/</a>







**RUKKI**  
*Indonesia Health Policy Forum*